



▶ APBD 2025

Pengadaan Seragam Dinas Terancam Batal

WONOSARI—Pengadaan seragam dinas baru untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Gunungkidul senilai Rp3,2 miliar terancam ditunda.

David Kurniawan
david@harianjogja.com

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih meminta rencana pengadaan seragam dinas baru untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunda. Hal ini tak lepas adanya efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. "Memang sudah terpasang pagunya Rp3,2 miliar. Tapi, kita minta ditunda untuk digunakan yang lebih penting," kata Endah saat ditemui wartawan, Senin (10/3).

Menurut dia, pagu yang dialihkan bisa digunakan mendukung program bupati sesuai dengan Asta Cita yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Pengadaan seragam kedinasan bisa ditunda, walaupun sudah diproses di LPSE," katanya.

- ▶ Hingga Senin (10/3) siang, di LPSE Gunungkidul masih tertera kegiatan pengadaan seragam dinas baru.
- ▶ Direncanakan, sebanyak 8.385 pegawai yang mendapat jatah seragam.

Hingga Senin siang, di LPSE Gunungkidul masih tertera kegiatan pengadaan seragam dinas baru. Total pagu yang dialokasikan sebesar Rp3.234.769.493 dan pendaftaran paling lambat hingga 27 Maret 2025.

Sementara Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Sunawan mengatakan tahun ini pihaknya memang telah menganggarkan pengadaan seragam dinas baru untuk ASN.

Total ada 8.385 pegawai yang mendapat jatah seragam sehingga total anggaran dialokasikan sebesar Rp3.240.300.000. "Masing-masing pegawai mendapat jatah seragam baru senilai Rp347.000," kata Sunawan saat dihubungi wartawan, Minggu (9/3).

Dia menjelaskan, pengadaan seragam dinas tertuang dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10/2024. Sesuai dengan ketentuan ini, maka pengadaan seragam ASN menjadi tanggungan negara. Adapun anggaran yang dialokasikan terdiri dari kain seragam khaki dengan ukuran kain tiga meter per orang. Selain itu, juga ada badge logo Kabupaten Gunungkidul, badge Pemkab Gunungkidul serta badge Kemendagri. "Terakhir kali pengadaan untuk seragam dilaksanakan di 2019 lalu. Tentunya pelaksanaan disesuaikan dengan aturan maupun kemampuan keuangan daerah milik Pemkab Gunungkidul," ucap dia.

Sunawan menambahkan, jatah seragam baru ini hanya sebatas bahan. Setiap pegawai diharuskan menjahit dengan ongkos sendiri. "Anggaran yang ada memang hanya untuk membeli bahan. Nanti diserahkan ke pegawai yang kemudian dijahitkan sendiri-sendiri," kata dia.